

Persepsi Ketua Bumdes, Kepala Desa dan Bendahara Desa, Terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan Dana Desa

Perceptions of Head of Bumdes, Head of Village and Village Treasurer, On The Ethics of Preparing Financial Reports of Village Funds

Endah Sri Wahyuni^{1*}, Imam Prayogo², Muhammad Ubaidillah³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Budi Luhur

^{2,3}Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro

^{1*}endah.swahyuni@budiluhur.ac.id, ²imamprayogo@lecturer.undip.ac.id, ³ubaidillah@lecturer.undip.ac.id

(* corresponding author)

Abstract

This study aims to determine the differences in perceptions between BUMDes head (Village-owned Enterprises), village head, and village treasurer on the ethics of preparing Financial Reports of the Village Fund. This research provides benefits to village officials and BUMDes managers in managing village funds and BUMDes funds to be transparent and accountable. This research is an empirical research with purposive sampling technique. Data was obtained by distributing questionnaires to 200 village officials in Indonesia. The questionnaires returned were 92 respondents consisting of 48 people from the head of BUMDes, 33 people from the village head and 11 village treasurers. Data analysis using ANOVA with SPSS version 25 program. The results obtained through hypothesis testing indicate that there is no significant difference in ethical perceptions of financial statement preparation between the BUMDes head, village head and village treasurer. There are differences in ethical perceptions of the preparation of financial reports between the BUMDes head and the village head. There are ethical differences in the preparation of financial reports between the BUMDes head and the village treasurer. There is no significant difference in the ethical perception of preparing financial reports between the village head and the village treasurer. Overall, it is indicated by the calculated F value of 4.940 with a significance of 0.008 (<0.05).

Keywords: *Ethics, Financial Report, BumDes Head, Village Head, Village Treasurer*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan persepsi antara Ketua BUMDes, Kepala Desa dan Bendahara Desa terhadap etika penyusunan Laporan Keuangan Dana Desa. Penelitian ini memberi manfaat kepada perangkat desa dan pengelola BUMDes dalam mengelola dana desa dan dana BUMDes guna transparan dan akuntabel. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan teknik purposive sampling. Data didapat dengan menyebarkan kuesioner kepada perangkat desa sebanyak 200 responden perangkat desa di Indonesia. Kuesioner yang dikembalikan sebanyak 92 responden yang terdiri dari 48 orang dari ketua BUMDes, 33 orang dari kepala desa dan 11 orang bendahara desa. Analisis data menggunakan ANOVA dengan program SPSS versi 25. Hasil yang didapat melalui pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi etika penyusunan laporan keuangan secara signifikan antara ketua BUMDes, kepala desa dan bendahara desa. Terdapat perbedaan persepsi etika penyusunan laporan keuangan antara ketua BUMDes

dengan kepala desa. Terdapat perbedaan etika penyusunan laporan keuangan antara ketua BUMDes dengan bendahara desa. Tidak terdapat perbedaan persepsi etika penyusunan laporan keuangan yang signifikan antara kepala desa dan bendahara desa. Secara keseluruhan ditunjukkan dengan nilai F hitung sebesar 4,940 dengan signifikansi 0,008 ($< 0,05$).

Kata Kunci: Etika, Laporan Keuangan, Ketua BUMDes, Kepala Desa, Bendahara Desa

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kurang sesuai harapan karena banyak mendapatkan masalah [1]–[3]. Di antaranya adalah wacana BUMDes yang masih baru khususnya sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan. UU tersebut menjelaskan pendirian, pengelolaan, hingga pembubaran BUMDes secara lebih terperinci. Dengan adanya UU Desa tersebut, diharapkan dapat memberikan dukungan untuk desa dalam hal pengelolaan sumber daya yang ada. Selain itu, pengembangan ekonomi masyarakat serta pemerintah desa yang mencakup pengelolaan keuangan dan kekayaan desa diharapkan dapat menjadi lebih mandiri.

Jumlah BUMDes yang terdata di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada bulan Juli 2018 mencapai 35 ribu dari 74.910 desa. Angka tersebut jauh melebihi target yang dipatok Kementerian Desa yaitu 5000 BUMDes atau setara lima kali lipatnya [2]. Meskipun demikian, secara hakikatnya mayoritas BUMDes masih sekadar berdiri karena belum adanya aktivitas bisnis yang menjanjikan. Di sisi lain, pemahaman kepala desa yang kurang menyebabkan banyak BUMDes yang layu sebelum berkembang.

Pengelolaan BUMDes membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten [3]. Aspek kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan karakteristik kepribadian individu yang berpengaruh terhadap kinerjanya [4]. Kompetensi SDM sangat penting mengingat anggaran BUMDes adalah dari dana desa pemerintah desa yang diberikan pemerintah pusat. Di sisi lain, SDM BUMDes perlu mengelola dana desa yang besar serta di akhir periode harus melaporkan laporan keuangan kepada direktur dan kepala desa dengan transparan dan akuntabel [5]. Pemangku kepentingan BUMDes menginginkan adanya informasi yang mencukupi dari laporan keuangannya. Realitanya, laporan tersebut belum tentu tersedia. Untuk menyediakan laporan keuangan tersebut, pemerintah desa harus mengeluarkan dana yang diperlukan untuk pengumpulan dan penyediaan informasi dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, informasi yang dapat disediakan akan menjadi terbatas. Secara teori, laporan keuangan dana desa harus tersaji secara alami dan tidak ada unsur *fraud, earning management, error* ataupun yang lain. Penyajiannya harus sesuai standar laporan keuangan dana desa. Adanya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Dana Desa menjadi bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi desa. Dengan demikian, diharapkan pemerintah desa mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan standar keuangan yang berlaku umum di Indonesia [6], [7].

Di akhir tahun 2015, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengeluarkan sistem yang bernama SIMDA Desa yang berfungsi sebagai standar pelaporan APBDes. Selanjutnya, SIMDA Desa berganti nama menjadi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan secara bertahap disosialisasikan ke desa-desa. Aplikasi ini telah menemukan bentuknya yang pasti. Siskeudes telah diterapkan oleh desa-desa yang ada di seluruh Indonesia [8].

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menganbil judul persepsi ketua BUMDes, kepala desa dan bendahara desa, terhadap etika penyusunan laporan keuangan dana desa. Penelitian ini termasuk penelitian *behavioral* karena mengkaji perilaku dan persepsi.

Kuesioner yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan model yang digunakan oleh Klikeman dan Henning [9].

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain. (1) Apakah terdapat perbedaan persepsi antara ketua BUMDes, kepala desa, dan bendahara desa terhadap etika penyusunan laporan keuangan dana desa? (2) Apakah terdapat perbedaan persepsi antara ketua BUMDes dengan kepala desa terhadap etika penyusunan laporan keuangan dana desa? (3) Apakah terdapat perbedaan persepsi antara ketua BUMDes dengan bendahara desa terhadap etika penyusunan laporan keuangan dana desa? (4) Apakah terdapat perbedaan persepsi antara kepala desa dengan bendahara desa terhadap etika penyusunan laporan keuangan dana desa?

Menilik sejarah yang ada, ilmu yang mengkaji proses pencatatan dalam dunia bisnis sudah ada sejak zaman Babilonia. Hal ini dapat dilihat pada usaha perdagangan yang mereka lakukan. Akan tetapi, sistem pembukuannya muncul dari praktik-praktik yang terjadi di Venesia. Oleh karena itu, *Luca Pacioli* dalam bukunya menyebutkan metode tersebut sebagai *Metode Venesia* [10].

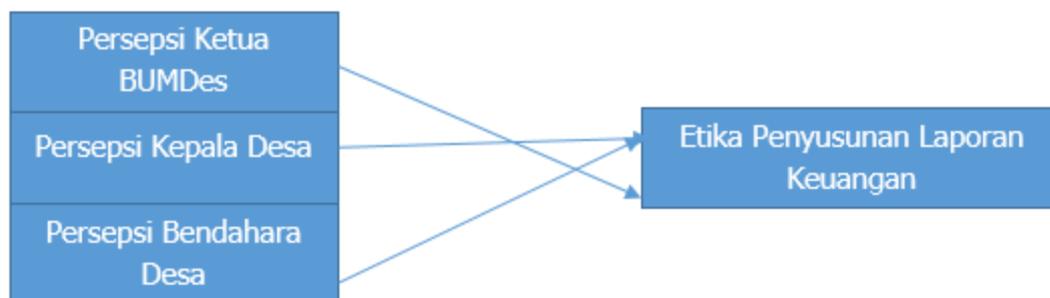
Laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai hasil akhir siklus akuntansi yang mencakup informasi keuangan entitas dan menggambarkan kondisi entitas yang digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban (*responsibility*) manajemen atas kinerja yang ada. Pernyataan ini sejalan dengan pertanggungjawaban pengelolaan dana abadi berdasarkan Undang-Undang Desa tentang dana desa yang menganjurkan desa membuat laporan keuangan [11].

Etika akuntan di Indonesia menjadi isu yang sangat menarik. Profesi akuntan tanpa etika tidak akan ada karena peran akuntan adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pengambilan keputusan bisnis oleh para pemangku kepentingan. Di sisi lain, profesi akuntan mendapat perhatian yang lebih dari masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran etika dari akuntan, baik akuntan publik, akuntan internal perusahaan maupun akuntan pemerintah [12]. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan terhadap ketua BUMDes, kepala desa dan bendahara desa karena salah satu tugas yang harus dilakukan oleh mereka adalah menyusun laporan keuangan berdasar PSAK dan menerapkan etika dalam pelaporan dana desa.

Penyusunan Pernyataan SAK-ETAP untuk Dana Desa menjadi bagian penting dari upaya pemberdayaan ekonomi dana desa. Pemerintah desa diharapkan dapat menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan yang berlaku umum di Indonesia. Penyusunan standar ini bertujuan untuk memberi padoman akuntansi yang tidak mengikat bagi pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangannya. Panduan ini diaplikasikan oleh unit usaha yang dimiliki desa yang berbadan hukum serta terdaftar di Kementerian Desa.

Laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh pemerintah desa bertujuan untuk: (a) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, arus kas dan informasi lain yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam rangka membuat keputusan ekonomi; serta (b) menjadi bentuk pertanggungjawaban pengelola yayasan dana desa terhadap penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengurus dana desa bertanggungjawab atas penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap dari dana desa meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas; serta catatan atas laporan Keuangan. Laporan keuangan dana desa disediakan dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, mata uang fungsional dan pelaporan dari laporan keuangan dana desa adalah rupiah [13].

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis mengonstruksikan kerangka pemikiran sebagaimana ditampilkan dalam gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian awal yang merujuk pada permasalahan yang terjadi pada masa ini. Penelitian dilakukan karena peneliti melihat adanya potensi kerawanan transparansi dan akuntabilitas pada pertanggungjawaban dana desa dari Undang-Undang Desa. Penelitian ini menggunakan instrumen yang diadopsi dari Clikeman dan Henning [9]. Penelitian ini menggunakan sampel yang berbeda yaitu ketua BUMDes, kepala desa, serta bendahara desa selaku penyusun laporan keuangan dana desa. Berdasarkan uraian di atas dan pada penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

- H1: Terdapat perbedaan persepsi antara ketua BUMDes, kepala desa, dan bendahara desa terhadap etika penyusunan laporan keuangan dana desa.
- H2: Terdapat perbedaan persepsi antara ketua BUMDes dengan kepala desa terhadap etika penyusunan laporan keuangan dana desa
- H3: Terdapat perbedaan persepsi antara ketua BUMDes dengan bendahara desa terhadap etika penyusunan laporan keuangan dana desa
- H4: Terdapat perbedaan persepsi antara kepala desa dengan bendahara desa terhadap etika penyusunan laporan keuangan dana desa

2. METODE PENELITIAN

2.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan ilmu Akuntansi, pendekatan empiris dan pendekatan komparatif dengan berpegang pada penelitian kualitatif deskriptif. Metode Pendekatan dengan ilmu Akuntansi merupakan cara atau prosedur dan metodologi yang dipergunakan untuk mengetahui Persepsi Ketua BUMDes, Kepala Desa dan Bendahara Desa terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan Dana Desa Berbasis PSAK.

2.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah ketua BUMDes, kepala desa dan bendahara desa yang berada pada desa-desa di Indonesia. Desa-desa yang diteliti adalah desa yang mempunyai unit usaha (koperasi atau yang semisal) serta pernah atau rutin menerima bantuan dana pemerintah baik pusat maupun daerah. Pemilihan sampel dalam penelitian ini diambil dengan dua metode sampling. Pengambilan sampel untuk kelompok ketua BUMDes, kepala desa dan bendahara desa dilakukan dengan *purposive sampling*.

2.3. Variabel Penelitian

Variabel dan definisi operasional dari penelitian ini adalah persepsi terhadap etika penyusunan laporan keuangan. Indikator etika penyusunan laporan keuangan direpresentasikan pada persepsi responden terhadap:

- a) Manajemen laba (*earnings management*)
- b) Salah saji pelaporan (*mistated*)

- c) Pengungkapan (*disclosure*)
- d) Biaya dan manfaat (*cost and benefit*)
- e) Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Instrumen ini dikembangkan Clikeman dan Henning [9], diukur dengan “skala Likert (7 point)”. Adapun angka 1 (satu) mengindikasikan sangat tidak setuju, sedangkan angka 7 (tujuh) mengindikasikan sangat setuju sekali”.

2.4. Teknis Analisis

- a) Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner

Pengujian instrumen penelitian baik dari segi validitasnya maupun reliabilitasnya terhadap 92 responden menunjukkan bahwa hasil instrumen penelitian yang digunakan adalah valid, di mana nilai korelasinya lebih besar dari 0.3 [14] dan koefisien keandalannya (*Cronbach Alpha*) lebih besar dari 0.6 [14].

- b) Uji Hipotesis

Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji perbedaan antarkelompok responden. Oleh sebab itu, pengujian hipotesis yang digunakan adalah *Analysis of Variance* (ANOVA) dengan tingkat signifikansi (α) 5%. ANOVA adalah metode untuk menguji hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Penggunaan metode ini adalah untuk mengetahui pengaruh utama (*main effect*) dari variabel independen kategorikal terhadap variabel metrik. Pengaruh utama adalah pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

- H1: Terdapat perbedaan persepsi antara ketua BUMDes, kepala desa, dan bendahara desa terhadap etika penyusunan laporan keuangan
- H2: Terdapat perbedaan persepsi antara ketua BUMDes dengan kepala desa terhadap etika penyusunan laporan keuangan
- H3: Terdapat perbedaan persepsi antara ketua BUMDes dengan bendahara desa terhadap etika penyusunan laporan keuangan
- H4: Terdapat perbedaan persepsi antara kepala desa dengan bendahara desa terhadap etika penyusunan laporan keuangan

Langkah-langkah analisis terhadap hasil ANOVA adalah sebagai berikut:

a. *Test of Between Subject Effects*

Angka ANOVA akan memperlihatkan pengaruh variabel independen terhadap dependen melalui tabel *Test of Between Subject Effects*. Ada tidaknya pengaruh utama (*main effects*) variabel independen terhadap variabel dependen dapat diketahui pada tingkat signifikansi variabel independen. Hipotesis yang diuji:

- H1: Terdapat perbedaan persepsi ketua BUMDes, kepala desa dan bendahara desa terhadap etika penyusunan laporan keuangan.

Adapun dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- 1) Signifikan bila nilai sig. < 0,05, artinya terdapat perbedaan persepsi antara ketiga kelompok tersebut (H1 diterima).
- 2) Tidak signifikan bila nilai sig > 0,05, artinya tidak terdapat perbedaan persepsi antara ketiga kelompok tersebut (H1 ditolak).

b. *Pos Hoc Test*

Dalam rangka mengkaji tingkat perbedaan persepsi antarkelompok dalam variabel maka penelitian ini menggunakan *Pos Hoc test* berupa *Turkey Test* dan *Bonferoni Test*.

Perbedaan rata-rata persepsi antara ketua BUMDes, kepala desa, dan bendahara desa dapat diketahui pada tabel *multiple comparison* di kolom *mean difference*. Berikutnya, untuk melihat apakah perbedaan nilai dalam tiap kelompok signifikan atau tidak, dapat diamati pada kolom *nilai sig*. Dasar pengambilan keputusannya:

- 1) Jika tingkat signifikansi $> 0,05$ maka tidak terdapat perbedaan rata-rata antarkelompok.
- 2) Jika tingkat signifikansi $< 0,05$ maka terdapat perbedaan rata-rata antarkelompok.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Valid atau tidak butir kuesioner ditentukan menggunakan r hitung. Nilai r hitung $> r$ tabel maka valid, sedangkan jika r hitung $< r$ tabel dikatakan tidak valid. Hasil uji validitas kuesioner semua kelompok dalam penelitian ini ditampilkan pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Semua Kelompok

Indikator	Item	R hitung	Keterangan
<i>Earnings Management</i>	EM	0,375	Valid
<i>Mistated</i>	M1	0,416	Valid
	M2	0,521	Valid
	M3	0,435	Valid
	M4	0,535	Valid
<i>Disclosure</i>	D1	0,475	Valid
	D2	0,353	Valid
	D3	0,445	Valid
<i>Cost-Benefit</i>	CB1	0,634	Valid
	CB2	0,616	Valid
	CB3	0,521	Valid
<i>Responsibility</i>	R1	0,375	Valid
	R2	0,433	Valid

Sumber: Data primer diolah,

Nilai R Tabel untuk jumlah N sebanyak 185 pada taraf signifikansi sebesar 5% adalah 0,141. Pada tabel 1 tersebut tampak bahwa nilai r hitung untuk semua indikator pada responden penelitian adalah di atas r tabel (0,141). Hal ini, menunjukkan semua indikator yang dipergunakan adalah valid.

Uji reliabilitas menunjukkan kestabilan dan kekonsistenan instrumen dalam mengukur konsep yang sama jika dilakukan pengukuran kembali dari waktu ke waktu. Pengukuran yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan *one shot study* yang menggunakan uji Statistik *Cronbach Alpha*. Suatu rangkaian pertanyaan dikatakan reliabel jika mempunyai nilai koefisien *Cronbach Alpha* di atas 0,6. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat di tabel 2.

Tabel 2. Reliability Statistics

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Cronbach's Alpha Based on Standardized Items</i>	N of Items
.726	.719	13

Pada table 2 menunjukkan nilai reliabilitas semua kelompok sebesar 0,719. Tampak semua nilai koefisien *Cronbach Alpha* adalah di atas 0,6 sehingga diinterpretasikan rangkaian kuesioner yang dipergunakan penelitian ini reliabel.

Analisis of Variance (ANOVA)

Hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan ANOVA. Hasil uji ANOVA selengkapnya dapat dilihat di tabel 3.

Tabel 3. ANOVA

	<i>Sum of Squares</i>	Df	<i>Mean Square</i>	F	Sig.
<i>Between Groups</i>	730.335	2	365.167	4.940	.008
<i>Within Groups</i>	13453.806	182	73.922		
Total	14184.141	184			

Tabel 3 memberikan nilai F hitung sebesar 4,940 dengan signifikansi sebesar 0,08. Untuk melihat secara detail perbedaan pada masing-masing kelompok, dilakukan uji *Post Hoc* yang ditunjukkan pada tabel *Post Hoc*. Tabel *Post Hoc* tersebut menunjukkan bahwa signifikansi antara kelompok kepala desa dengan kelompok bendahara desa adalah sebesar 0,017 pada Tukey HSD dan sebesar 0,018 pada Benferroni. Nilai tersebut berada di bawah 0,05 yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara kelompok ketua BUMDes dengan kelompok kepala desa.

Tabel 4: Post Hoc Test
Multiple Comparisons

Dependent Variable: Total

	(I) KODE	(J) KODE			
			<i>Mean Difference (I-J)</i>	Std. Error	Sig.
<i>Tukey HSD</i>	1	2	3.966*	1.429	.017
		3	-.214	1.704	.991
	2	1	-3.966*	1.429	.017
		3	-4.180*	1.683	.037
	3	1	.214	1.704	.991
		2	4.180*	1.683	.037
<i>Bonferroni</i>	1	2	3.966*	1.429	.018
		3	-.214	1.704	1.000
	2	1	-3.966*	1.429	.018
		3	-4.180*	1.683	.042
	3	1	.214	1.704	1.000
		2	4.180*	1.683	.042
<i>Tamhane</i>	1	2	3.966*	1.347	.011
		3	-.214	1.875	.999
	2	1	-3.966*	1.347	.011
		3	-4.180	1.868	.083
	3	1	.214	1.875	.999
		2	4.180	1.868	.083

*. *The mean difference is significant at the 0.05 level.*

Lebih lanjut signifikansi antara kelompok kepala desa dengan bendahara desa adalah sebesar 0,037 (*Tukey HSD*) dan sebesar 0,042 (*Benferroni*). Nilai tersebut berada di bawah 0,05 yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara kepala desa dengan kelompok bendahara desa.

Rincian yang ketiga adalah antara kelompok ketua BUMDes dengan kelompok kepala desa dengan signifikansi sebesar 0,991 (*Tukey HSD*) dan sebesar 1,000 (*Benferroni*). Keduanya berada di atas 0,05 yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok ketua BUMDes dengan kelompok kepala desa.

Perbedaan Persepsi Ketua BUMDes, Kepala Desa, dan Bendahara Desa terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan

Hipotesis pertama menunjukkan terdapat perbedaan persepsi yang signifikan pada ketiga sampel penelitian yaitu sampel ketua BUMDes, kepala desa, dan bendahara. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai F hitung sebesar 4,940 dengan signifikansi sebesar 0,008 ($< 0,05$). Maka secara umum, etika penyusunan laporan keuangan dipersepsikan berbeda oleh masing-masing kelompok. Kemungkinan karena adanya perbedaan karakteristik dari masing-masing kelompok sehingga mempunyai persepsi berbeda tentang etika dalam penyusunan laporan keuangan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman mampu memberikan tingkat pemahaman yang lebih kepada seorang perangkat desa. Maka dari itu, seorang perangkat desa yang mempunyai tingkat pendidikan cukup, dan juga mempunyai pengalaman yang relatif banyak di bidang keuangan dapat dikatakan memiliki persepsi etis lebih baik terhadap penyusunan laporan keuangan.

Perbedaan Persepsi Ketua BUMDes dan Kepala Desa terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan

Hipotesis kedua menunjukkan terdapat perbedaan persepsi etika penyusunan laporan keuangan antar kelompok ketua BUMDes dengan kelompok kepala desa. Hasil ini ditunjukkan dengan uji *Post Hoc* dengan signifikansi sebesar 0,017 (*Tukey HSD*) dan sebesar 0,018 (*Benferroni*) yang keduanya di bawah 0,05. Perbedaan persepsi ini dimungkinkan karena Ketua BUMDes bekerja dituntut secara optimal dan profesional dengan evaluasi kinerja. Lain halnya Kepala Desa yang merupakan pengguna anggaran daerah. Perbedaan tugas pokok dan fungsi inilah dapat menjadi pembeda dalam sudut pandang.

Perbedaan lain persepsi etika penyusunan laporan keuangan ketua BUMDes dengan kepala desa yaitu tingkat pendidikan dan pengalaman. Ketua BUMDes sebagai *novice* mempunyai pengalaman yang jauh lebih rendah dari pada kepala desa. Demikian juga dalam hal kepemimpinan, ketua BUMDes masih minim pengalaman dibandingkan dengan kepala desa.

Perbedaan Persepsi Ketua BUMDes dan Bendahara Desa terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan

Hipotesis ketiga menunjukkan terdapat perbedaan persepsi etika penyusunan laporan keuangan antara Ketua BUMDes dengan Bendahara Desa. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi uji *Post Hoc* sebesar 0,037 (*Tukey HSD*) dan sebesar 0,042 (*Benferroni*) yang keduanya di bawah 0,05. Berdasarkan data deskripsi di lapangan, Bendahara Desa minimal rata-rata diambil dari lulusan SMK jurusan Akuntansi. Hal ini, menjadikan Bendahara Desa lebih paham terhadap siklus akuntansi dibanding Ketua BUMDes.

Perbedaan lainnya dikarenakan perbedaan tingkat pengalaman penyusunan laporan keuangan dan tingkat pendidikan. Bendahara desa minimal telah menempuh pendidikan

sampai dengan D3/S1 ditambah dengan pengalaman mengelola anggaran desa. Selain itu, ketua BUMDes relatif minim pengalaman dalam menyusun laporan keuangan.

Perbedaan Persepsi Kepala Desa dan Bendahara Desa terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan

Hipotesis keempat tidak menemukan perbedaan persepsi etika penyusunan laporan keuangan antara kepala desa dengan bendahara desa. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi pada uji *Post Hoc* sebesar 0,991 (*Tukey HSD*) dan sebesar 1,000 (*Benferroni*) yang keduanya di atas 0,05. Tidak adanya perbedaan ini dimungkinkan karena adanya kesamaan karakteristik antara kepala desa dengan bendahara desa. Kedua kelompok ini relatif mempunyai tingkat pendidikan dan pengalaman yang relatif sama.

Tingkat pengalaman mengelola anggaran, bendahara desa mungkin sedikit lebih tinggi dibandingkan kepala desa. Tingkat pendidikan Bendahara Desa pun, secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan Kepala Desa. Akan tetapi, dalam hal kepemimpinan desa relatif lebih banyak kepala desa.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tentang persepsi ketua BUMDes, kepala desa, dan bendahara desa terhadap etika penyusunan laporan keuangan, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan persepsi antara ketua BUMDes dengan kepala desa, ketua BUMDes dengan bendahara desa. Namun tidak ada perbedaan persepsi antara kepala desa dengan bendahara desa terhadap etika penyusunan laporan keuangan.

Kesimpulan ini didukung hasil analisis data berikut ini, bahwa terdapat perbedaan persepsi etika penyusunan laporan keuangan yang signifikan antara kelompok ketua BUMDes, kepala desa dan bendahara desa. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai F hitung sebesar 4,940 dengan signifikansi sebesar 0,008 ($< 0,05$). Terdapat perbedaan persepsi etika penyusunan laporan keuangan yang signifikan antara ketua BUMDes dengan kepala desa. Hasil ini ditunjukkan dengan signifikansi pada uji *Post Hoc* sebesar 0,017 (*Tukey HSD*) dan sebesar 0,018 (*Benferroni*) yang keduanya di bawah 0,05. Terdapat perbedaan persepsi etika penyusunan laporan keuangan yang signifikan antara ketua BUMDes dengan bendahara desa. Hasil ini ditunjukkan dengan signifikansi pada uji *Post Hoc* sebesar 0,037 (*Tukey HSD*) dan sebesar 0,042 (*Benferroni*) yang keduanya di bawah 0,05. Tidak terdapat perbedaan persepsi etika penyusunan laporan keuangan yang signifikan antara kepala desa dengan bendahara desa. Hasil ini ditunjukkan dengan signifikansi pada uji *Post Hoc* sebesar 0,991 (*Tukey HSD*) dan sebesar 1,000 (*Benferroni*) yang keduanya di atas 0,05.

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman mampu memberikan tingkat pemahaman yang lebih baik kepada perangkat desa. Maka dari itu, perangkat desa yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, juga mempunyai pengalaman relatif banyak dapat dikatakan memiliki persepsi etis lebih baik terhadap penyusunan laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] K. P. Suryatimur, S. A. Khotijah, and P. K. Prasetyanto, "Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan pada BUMDes Desa Balesari," *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI*, vol. 4, no. 2, pp. 242–246, 2020.
- [2] D. Muhtada, S. Sastroatmodjo, and A. Diniyanto, "Penguatan BUMDes Menuju Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera di Kecamatan Mrebet Kabupaten

- Purbalingga,” in *Seminar Nasional Kolaborasi Pengabdian pada Masyarakat 2018*, 2018, vol. 1, pp. 439–446, [Online]. Available: <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snkppm/article/view/153>.
- [3] E. H. Aponno and S. Hutubessy, “Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDes di Kecamatan Kairatu dan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat JAMAK (Manajemen dan Akuntansi)*, vol. 3, no. 2, pp. 246–258, 2020.
- [4] E. Elizar and H. Tanjung, “Pengaruh Pelatihan, Kompetensi, Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai,” *Maneggio Jurnal Ilmu Magister Manajemen*, vol. 1, no. 1, pp. 46–58, 2018.
- [5] A. Kasmawati and N. L. Yuliani, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dan Faktor Yang Mempengaruhinya,” in *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 2021, pp. 360–375, [Online]. Available: <https://journal.unimma.ac.id>.
- [6] J. S. Lintong, E. A. N. Limpeleh, and B. Sungkowo, “Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP pada BUMDes ‘Kineauan’ Desa Wawona Kabupaten Minahasa Selatan,” *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, vol. 16, no. 1, pp. 95–101, 2020.
- [7] Z. I. Ferina, S. Hanila, Y. Fitriano, N. Susanti, and A. Soleh, “Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Bumdes Desa Pulau Panggung Kecamatan Talang Empat Bengkulu Tengah,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia*, vol. 3, no. 1, pp. 324–333, 2020.
- [8] M. M. Welley, R. A. M. Koleangan, and G. M. V. Kawung, “Perbandingan Sebelum Dan Sesudah Menggunakan Aplikasi Siskeudes Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Desa,” *Jurnal Pembangan Ekonomi dan Keuangan Drh.*, vol. 19, no. 8, pp. 79–91, 2019.
- [9] P. M. Clikeman and S. L. Henning, “The Socialization of Undergraduate Accounting Students,” *Issues Account. Educ.*, vol. 15, no. 1, pp. 1–17, 2000.
- [10] C. Totanan and N. Paranoan, “Going Concern dalam Metafora Ondel-Ondel,” *Jurnal Akunt. Multiparadigma*, vol. 9, no. 1, pp. 87–105, 2018.
- [11] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. 2014.
- [12] D. Sunadi, “Pelanggaran etika profesi akuntan kasus akuntan raden motor,” *Jurnal PUSDANSI*, vol. 2, no. 3, pp. 1–9, 2022, [Online]. Available: <http://pusdansi.org/index.php/pusdansi/article/view/107>.
- [13] Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ETAP*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- [14] I. Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.